ABSTRAK

Haisah. *Konstruksi Hukum Wa`ad Pada Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah.* Pembimbing: (I) Prof. DR. H. Akh. Fauzi Aseri, MA (II) Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata kunci: Konstruksi Hukum *Wa`ad* dan Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah

Penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa di Indonesia hukum janji (*wa`ad*) akan mengikat jika memenuhi 5 (lima) ketentuan khusus terkait pelaksanaan *wa`ad* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa No: 85/DSN-MUI/XII/2012. Di Indonesia, mengikatnya janji (*wa`ad*) selain harus ada sesuatu hal (syarat) yang harus dikaitkan dalam janji (*wa`ad*) dan si penerima janji telah melakukan hal yang dipersyaratkan padanya sebagaimana pendapat Mazhab Maliki, ada 3 (tiga) ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh penerima janji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan menggunakan kata-kata dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka. Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama hukum memenuhi janji dalam tinjauan fiqih, terdapat perbedaan (*ikhtilāf*) diantara para fuqahā mengenai status hukum memenuhi janji, yaitu: *Pendapat pertama* menurut mayoritas fuqahā hukumnya adalah *mustahab* yaitu hukumnya mengikat secara agama tetapi tidak mengikat secara hukum formal. *Pendapat kedua* yaitu wajib mutlak yaitu semua janji hukumnya mengikat. *Pendapat ketiga* adalah wajib *mu`allaq*, terdapat dua jenis wajib *mu`allaq*, pertama wajib memenuhi janji baik syarat tersebut dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi; kedua tidak wajib memenuhi janji kecuali syaratnya terpenuhi. Pendapat yang dipilih adalah pendapat yang kedua yaitu terikatnya janji bagi pihak yang berjanji atau melakukan perjanjian baik secara agama maupun hukum formal. Kedua: *Wa`ad* adalah perbuatan yang dilakukan di masa yang akan datang (*istiqbāl*). Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang berkaitan tentang *wa`ad* dimana ada beberapa akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah yaitu: dalam fatwa *murabahāh* hukum janjinya mengikat, sedangkan dalam fatwa *Ijārah Muntahiya Bi Al-Tamlīk* hukum janjinya tidak mengikat, adapun dalam fatwa yang lain hukum janjinya tidak dijelaskan apakah mengikat atau tidak. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak dijelaskan sama sekali perihal janji maupun hukumnya dalam transaksi di perbankan syariah. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang bertransaksi dalam bisnis karena dalam praktiknya salah satu pihak bisa dirugikan.